



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 Desember 2013



Editor :

Dwi Rachmina
Rita Nurmalina
Ratna Winandi
Nunung Kusnadi
Burhanuddin
Anna Fariyanti

PROSIDING SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Bogor, 27 Desember 2013

EDITOR :

Dwi Rachmina
Rita Nurmalina
Ratna Winandi
Nunung Kusnadi
Burhanuddin
Anna Fariyanti

**PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS**
Bogor, 27 Desember 2013

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MSi (Gugus Kendali Mutu Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Unit Penjamin Mutu FEM - IPB)

EDITOR :

- Ketua : Dr. Ir. Dwi Rachmina, MSi
- Anggota : - Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Dr. Ir. Ratna Winandi, MS
- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS
- Dr. Ir. Burhanuddin, MM
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MSi

TIM TEKNIS :

- Tintin Sarianti, SP, MM

DESAIN DAN TATA LETAK :

- Hamid Jamaludin Muhrim, SE

Diterbitkan Oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.fem.ipb.ac.id>

ISBN : 978-602-14623-1-7

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbitkan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 10 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 27 Desember 2013. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu kajian Bisnis dan Kewirausahaan (7 makalah), dan Kebijakan (3 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan serta Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir Dwi Rachmina, MSi sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2014
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Kajian Usahatani Karet Rakyat di Provinsi Jambi..... Dwi Rachmina, Netti Tinaprilla, Eva Yolynda, dan Feryanto	1
Integrasi Usahatani Padi-Ternak pada Usahatani Kecil di Provinsi Jawa Barat: Komplementer atau Kompetitif? Nunung Kusnadi	19
Kelayakan Investasi Pengusahaan Bioetanol Berbahan Baku Nipah di Indonesia Bagian Timur Rita Nurmalina, Trees A. Pattiasina, dan Nia Rosiana	37
Pengaruh Risiko Produksi dan Harga Terhadap Keputusan Penggunaan Input pada Usahatani Caisim di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (<i>The Effect of Price and Production Risks to Decision of Input on Caisim Farming in Nagrak, Sukabumi</i>)..... Anna Fariyanti, M. Firdaus, E. Gunawan, dan H. Harti	51
Pola Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nunung Kusnadi, Anna Fariyanti, Juniar Atmakusuma, Tintin Sarianti, dan Yanti Nuraeni Muflikh	69
Studi Kelayakan Bisnis Mie Kering Jagung 100% Nunung Kusnadi, Rita Nurmalina, Tintin Sarianti, dan Arif Karyadi	93
Analisis Keragaan Kewirausahaan: Daya saing dan Inovasi Peternak Ayam Broiler dalam Pertumbuhan Bisnis Rachmat Pambudy, Henny K. Daryanto, Wahyu Budi Priatna, Burhanuddin, Popong Nurhayati, Siti Jahroh, dan Nia Rosiana	117

KAJIAN KEBIJAKAN

Kajian Rantai Pasok Karet Rakyat di Provinsi Jambi..... Rita Nurmalina, Amzul Rifin, Harmini dan Dwi Nurul Amalia	135
---	-----

Pengkajian Ulang, Perumusan dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan serta Strategi bagi Pembangunan Sistem Agribisnis Ayam Ras Pedaging dan Petelur di Indonesia	151
Rachmat Pambudy	
Kajian Subsistem Penunjang Agribisnis Karet di Jambi	177
Ratna W. Asmarataka, Harianto, Suharno, Andriyono K. Adhi, Lukman M. Baga, dan Maryono	

PENGAJIAN ULANG, PERUMUSAN DAN REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN SERTA STRATEGI BAGI PEMBANGUNAN SISTEM AGRIBISNIS AYAM RAS PEDAGING DAN PETELUR DI INDONESIA

Oleh:

Rachmat Pambudy

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

e-mail :pambudy@hotmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to re-evaluate, formulate, and recommending alternative policy and strategy regarding the development of Indonesian agribusiness system of broiler and layer. The data collected by mean of interview and desk study, the data itself containing information about price fluctuation on entire broiler and layer agribusiness system. The result of the study shows, that the government need to maintain the price balance and stabilization on poultry product and its mean of production. The government also ought to support on the development and enhancement of model, mechanism, and partnering system in broiler and layer on-farm management, which become its advantage. Partnering system in sugar and palm oil become a good example to be implemented, in order to enhance the policy and program to develop Indonesian poultry agribusiness system.

Keywords: Policy, Government, Price Fluctuation

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji ulang, merumuskan, dan merekomendasikan alternatif kebijakan dan strategi bagi pembangunan sistem agribisnis ayam ras Indonesia. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan menghimpun literatur tentang pengetahuan fluktuasi harga mulai dari pembibitan, pakan ternak, budidaya ayam ras hidup, telur serta daging ayam. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pemerintah perlu secara aktif menjaga stabilisasi dan keseimbangan harga baik produk unggas dan sarana produk. Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan dan penyempurnaan mekanisme, model, dan sistem kemitraan yang selama ini menjadi andalan budidaya terutama di ayam ras pedaging. Model kemitraan di kelapa sawit dan gula dapat dijadikan model dan contoh dalam pengembangan kebijakan dan program pengembangan perunggasan nasional.

Kata kunci: kebijakan, pemerintah, fluktuasi harga.

I. PENDAHULUAN

Kontribusi dan posisi strategis agribisnis peternakan ayam ras skala makro dan mikro membuat ayam ras ini menjadi salah satu komoditas primadona dan strategis dalam pembangunan peternakan, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Ayam ras pedaging dan petelur sangat penting didalam sumber pemenuhan protein hewani yang relatif murah dan mudah didapatkan bagi kebutuhan

pangan penduduk Indonesia. Tetapi sampai saat ini, agribisnis peternakan ayam ras ini masih menghadapi berbagai kendala dan masalah mendasar yang menghambat daya saing, pertumbuhan dan kemajuannya. Kendala dan permasalahan mendasar tersebut berasal dalam negeri (internal/nasional/domestik) dan luar negeri (eksternal/ global).

Dari sisi global (eksternal), agribisnis perunggsan nasional menghadapi ancaman dan tekanan dari peningkatan ekskalasi persaingan global di hampir semua rantai nilai (*value chains*) terkait mulai dari bahan baku pakan (jagung), ayam hidup, daging ayam segar dan olahan, sampai makanan olahan berbasis daging ayam ras. Saat ini secara global dapat dikatakan sedang terjadi ‘perang ayam’ atau ‘*game of chicken*’. Sebagian besar negara-negara besar dan maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Rusia, Brazil, dan Cina serta negara lainnya secara bersamaan berusaha maksimal menggenjot produksi daging dan telur ayam ras mereka baik untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan asal daging dan telur domestik maupun untuk diekspor ke pasar global. Persaingan global dan ‘perang ayam’ internasional ini membawa dampak pada semakin kompetitif dan semakin beratnya tekanan pasar dunia terhadap para pelaku dan pemangku kepentingan agribisnis perunggsan nasional.

Dari sisi teknis, seperti rasio konversi pakan (*feed conversion ratio/FCR*), Indonesia sudah dapat menyamai negara-negara produsen daging dan telur ayam ras lainnya didunia. Tetapi dengan relatif tingginya biaya produksi yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan baku pakan, yang merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ayam ras, maka efisiensi teknis menjadi relatif rendah dalam ukuran efisiensi ekonomis (atau kurang dapat bersaing dari sisi harga). Dan diperparah lagi dengan kurangnya bahkan seringkali tidak efektifnya kebijakan-kebijakan dan strategi yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah.

Posisi dan dukungan pemerintah dalam hal proteksi bagi industri perunggsan untuk menghadapi ancaman tersebut diatas juga masih belum final dan konsisten. Padahal dukungan dan keberpihakan politik ekonomi pembangunan perunggsan nasional sangat diperlukan.

Tujuan penelitian ini adalah mereview dan merumuskan skenario dan rekomendasi alternatif kebijakan dan strategi bagi pembangunan sistem agribisnis ayam ras Indonesia umumnya dan khususnya untuk stabilisasi harga daging dan telur ayam ras. Stabilisasi harga penting untuk produsen dan konsumen. Stabilisasi harga telur dan daging ayam juga penting untuk perencanaan dan kebijakan pangan nasional

II. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di level nasional untuk analisis struktur perilaku dan kinerja pasar serta dinamika harga. Studi ini juga lebih diarahkan untuk kajian level agribisnis atau industri perunggsan level makro. Sesuai dengan tujuan kajian yang ingin

dicapai, level pengumpulan data dan analisis tidak mencapai individu dan atau kelompok individu. Selain itu, dilakukan kunjungan lapangan di beberapa lokasi-lokasi produsen utama bibit, pakan, ayam ras hidup, telur, dan produk olahan sekunder ayam ras untuk mengkonfirmasi atau menverifikasi statistik atau data yang diperlukan serta mendiskusikan dinamika dan perkembangan terkini beberapa aspek strategis dalam agribisnis ayam ras.

Kunjungan lapang hanya diarahkan untuk mendapatkan informasi umum. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), dengan pertimbangan utama kabupaten/kotamadya produsen atau konsumen utama dan ketersediaan data yang memadai. Lokasi studi yang dipilih adalah Kotamadya Medan di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lampung di Propinsi Lampung, DKI Jakarta, Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo di Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Makasar di Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan adalah data sosial ekonomi dan pertanian serta informasi level propinsi dan level perusahaan tertentu di propinsi terpilih, mencakup data primer dan sekunder. Walau data primer yang dikumpulkan hanya terbatas dalam bentuk daftar pertanyaan kualitatif.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan *Rapid Appraisal Methods* yang mengkombinasikan lima metode pengumpulan data yaitu wawancara informan kunci, wawancara *focus group*, wawancara kelompok (komunitas), pengamatan terstruktur, survei informal informan atau pakar kunci (*expert judgement discussion*). Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan kualitatif untuk aspek-aspek dan variable utama kajian. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode penelusuran dokumen (arsip surat-surat, laporan-laporan instansi/lembaga, laporan penelitian, publikasi data statistik, berita media massa, dan lain-lain). Untuk data dan informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber resmi, dilaksanakan wawancara dan atau diskusi berkelompok (*Focus Group Discussion*) para nara sumber terpilih (*expert judgement discussion*).

Data primer dan sekunder dikumpulkan dari sumber yang berbeda. Data primer bersumber langsung dari individu-individu informan kunci dan responden terpilih di lapangan. Sedangkan data sekunder ditelusur di bagian dokumentasi instansi/lembaga terkait agribisnis ayam ras.

Informan kunci dipilih dari kalangan tokoh informal dan formal yang, karena status dan peran sosialnya (kedudukan, jabatan), memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas atau mendalam di bidang agribisnis ayam ras. Informan kunci juga dapat dipilih berdasarkan pengembangan dan usulan dari informan kunci sebelumnya. Penelusuran informasi dan dan pengetahuan ini juga dilaksanakan secara berurutan dan berlapis (*snowballing*).

Pemilihan responden untuk kunjungan lapangan dan survei informal dipilih menggunakan teknik penarikan *convenience sampling*. Jumlah responden yang

ditetapkan adalah terbatas berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing aspek yang akan dikaji. Penetapan jumlah responden yang terbatas ini didasari pemikiran dan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi terkini dan umum dari dinamika berbagai subsistem dan atau usaha di dalam agribisnis ayam ras, dan tidak untuk penelitian mendalam akan suatu aspek atau materi tertentu.

Data lapangan (primer dan sekunder) terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Untuk menerangkan tujuan studi ini, data tersebut dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan prosedur kategorisasi data, matriks hubungan antar-kategori, dan deskripsi makna hubungan. Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik tabulasi khususnya tabel frekuensi dan analisis pangsa (deskriptif) serta bila data yang dikumpulkan dinilai memadai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi dan posisi strategis agribisnis peternakan ayam ras dalam skala makro maupun mikro membuat agribisnis ini menjadi salah satu komoditas primadona dan strategis dalam pembangunan peternakan khususnya dan pembangunan pertanian bersama-sama dengan pembangunan agribisnis umumnya. Sistem dan usaha agribisnis ayam ras atau secara lebih luas lagi dapat disebut industri perunggasan, merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling terkait sebagai suatu industri yang terdiri subsistem hulu, subsistem budidaya, dan subsistem hilir serta jasa-jasa penunjang yang terkait langsung dengan ketiga subsistem yang disebut sebelumnya.

3.1. Subsistem Sarana Produksi

Didalam subsistem agribisnis hulu termasuk seperti industri perbibitan mulai dari industri bibit ayam nenek (GPS), bibit ayam induk (PS) dan bibit ayam niaga (FS) dan industri pakan ternak serta industri peralatan mesin peternakan. Subsistem hulu sangat strategis karena merupakan salah satu tulang punggung dari keunggulan dan keberlangsungan agribisnis perunggasan nasional. Keunggulan dan kualitas baik genetik, fisik, nutrisi, dan daya saing ekonomis dari produk perunggasan baik daging dan telur akan sangat ditentukan mulai dari kualitas bibit (dalam hal ini DOC) ayam pedaging dan ayam petelur.

Pada Tabel 1 nilai tambah terbesar dari keseluruhan rangkaian nilai (*value chain*) agribisnis perunggasan justru terletak di industri sarana dan input produksi terutama pakan ternak lalu diikuti oleh bibit/DOC. Nilai tambah lain yang relatif besar dan menguntungkan adalah industri obat dan vaksin. Tetapi industri-industri ini membutuhkan investasi finansial yang sangat besar dan dalam jangka panjang, teknologi maju dan unggul, sumberdaya manusia dan keahlian yang relatif tinggi/berkualitas, serta dukungan sistem informasi yang mumpuni. Hanya sebagian

besar perusahaan dan pengusaha serta pelaku usaha swasta yang menguasai serta berani mengambil resiko-resiko serta sekaligus kesempatan-kesempatan ekonomis.

Tabel 1. Profil Industri dan Produk-Produk Perunggasan Indonesia Berdasarkan Nilai Total Industri (*Turn Over*) Tahun 2007-2009

Produk Unggas & Investasi (Angka Estimasi)	2007			2008			2009		
	QTY	Rupiah (Miliar)	+/- % (Value)	QTY	Rupiah (Miliar)	+/- % (Value)	QTY	Rupiah (Miliar)	+/- % (Value)
DOC - BR (juta ek)	1,150	3,220	19.8	950	2,945	(8.5)	1,000	3,000	1.9
DOC - LY (juta ek)	62	403	11.9	50	375	(6.9)	53	382	1.8
DOC - Jnt (juta ek)	62	93	6.9	50	88	(5.9)	53	90	3.0
Pakan Unggas (T)	7,100	24,850	15.2	7,200	30,600	23.1	7,500	32,250	5.4
Obat & Vaksin	-	1,200	9.1	-	1,250	4.2	-	1,300	4.0
Peralatan	-	200	5.3	-	210	5.0	-	210	-
Sub-Total		29,966	15.3		35,468	18.4		37,232	5.0
Karkas Broiler	1,050	11,025	8.5	1,011	13,140	19.2	1,064	13,619	3.6
Telur Ayam Ras	1,195	13,145	9.2	1,150	13,800	5.0	1,200	14,160	2.6
Sub-Total		24,170	9.0		26,940	11.5		27,779	3.1
Investasi (CAPEX)									
Feedmill (12 - 12,5 jt T)		20,000			20,500	2.5		20,500	-
Breeding (+/- 12 jt ek)		6,000			6,200	3.3		6,200	-
Farm BR & LY (M)		9,500			9,750	2.6		9,800	0.5
Sub-Total		35,500			36,450	2.7		36,500	0

Sumber : GPPU(dianalisis)

Note: (1) Vaksin & obat ayam ras tidak termasuk premix;

(2) Pakan untuk ayam ras + itik + puyuh

(3) penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung +/-4 juta keluarga

3.2. Permasalahan Industri Sarana Produksi

Teknologi yang dominan dan intensif adalah dalam budidaya ayam ras terdapat pada industri bibit dan industri pakan, sehingga tingkat efisiensi teknis budidaya ayam ras sangat ditentukan oleh kualitas dan keunggulan terutama DOC dan pakan. Disamping memang kualitas dan keunggulan manajemen budidaya juga ikut menentukan pada akhirnya.

Kedua input tersebut di level bahan baku seperti bibit *Great Parent Stock* (GPS) dan jagung masih tergantung impor sehingga harga dan keberadaan kedua input itu dipengaruhi kondisinya di pasar internasional.

Di sisi lain industri saprodi yaitu DOC, pakan dan obat-obatan terkonsentrasi di Jawa, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi. Pihak industri saprodi masih belum melakukan ekspansi ke daerah-daerah baru tersebut dengan mempertimbangkan beberapa alasan seperti belum tercapainya skala ekonomi, bahan baku masih terbatas, dan/atau iklim investasi belum mendukung. Kondisi ini membuat usaha budidaya ayam ras pedaging di daerah lain harus mendatangkan saprodi dari daerah lain. Kegiatan ini membutuhkan biaya transportasi, sehingga harga input menjadi lebih mahal. Dengan harga input yang relatif mahal diperkirakan usaha ayam pedaging di luar sentra utama dilakukan oleh pengusaha bermodal dengan skala relatif besar dan

pola usaha mandiri dibanding di sentra produksi utama seperti di Jawa dan Lampung dengan pola usaha kemitraan.

3.3. Subsistem Budidaya

Makin majunya teknologi ayam ras, lancarnya sistem transportasi nasional dan makin meningkatnya permintaan terhadap produk ayam ras, menyebabkan usaha ini berkembang pesat ke luar Jawa khususnya berbagai daerah pertumbuhan baru. Hadi *et al.* (2007) melaporkan terdapat pusat-pusat usaha budidaya baru di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Namun karena masih tetap tingginya permintaan daerah-daerah tersebut dan produksi sendiri masih belum mencukupi maka sampai saat ini daerah ini masih tetap harus mendatangkan produk ayam ras dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

3.4. Permasalahan Budidaya Ayam Ras Pedaging

Fenomena fluktuasi harga daging ayam ras yang masih terus berlangsung ini perlu mendapat perhatian dan intervensi pemerintah untuk ditekan lebih rendah dan dikelola agar semakin stabil serta relatif tetap menguntungkan bagi para pelaku usaha di agribisnis ayam ras pedaging.

Hal utama yang perlu disampaikan adalah adanya shock pada usaha budidaya menyebabkan terjadinya pergeseran struktur industri perunggasan. Pergeseran tersebut dapat berupa: (1) karena keterbatasan modal usaha ayam ras pedaging pola mandiri skala kecil beralih menjadi usaha dengan pola kemitraan dengan skala perusahaan lebih besar dan (2) pada daerah yang tidak terjamah usaha kemitraan, usaha ayam ras pedaging pola mandiri yang bertahan unit usahanya menjadi sedikit dengan skala perusahaan yang juga lebih sedikit. Apalagi selama ini usaha budidaya ayam ras termasuk yang skala kecil tidak tersentuh dengan dana program pemerintah. Dengan demikian secara alami, usaha ayam ras pedaging makin terpusat pada pola usaha kemitraan antara peternak sebagai plasma dan pengusaha sebagai inti.

Padahal sebelumnya, struktur perusahaan budidaya ayam ras pedaging masih mampu didominasi oleh kemitraan pola mandiri skala kecil terutama di desa-desa di sentra produksi baik sentra utama tradisional (lama) maupun di sentra produksi baru. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan keberpihakan kebijakan dan program yang kuat, konsisten dan nyata dari pemerintah, terutama dalam hal menjamin dan mengembangkan kepastian dan jaminan keberuntungan seluruh usaha dan kegiatan di seluruh sistem agribisnis ayam ras pedaging secara integral mulai dari budidaya, industri pakan, industri DOC, dan pemasaran serta distribusinya sampai ke tangan konsumen.

Sementara bagi para pelaku usaha swasta besar dan menengah, dukungan dan jaminan keberlangsungan dan tingkat keuntungan usaha yang wajar atau normal

menjadi salah satu insentif dan faktor pendorong yang perlu diciptakan dan difasilitasi pemerintah untuk tetap bisa mempertahankan pertumbuhan baik populasi maupun produksi produk-produk perunggasan (daging, telur, DOC, pakan, dan lain -lain). Termasuk juga dukungan dan jaminan dalam pengembangan model kemitraan perunggasan yang mampu menguntungkan seluruh pemangku kepentingan perunggasan dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kecenderungan menurunnya pola usaha sektor-3 dan bahkan sektor-4 didalam agribisnis ayam ras pedaging ini harus menjadi perhatian dan memerlukan keberpihakan pemerintah yang serius. Kecenderungan ini harus dihentikan bahkan dibalik agar tujuan dan target pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan berusaha serta pertambahan nilai tambah ekonomi bagi rakyat kecil dan rumah tangga terutama di pedesaan dapat tercapai. Pemerintah harus lebih progresif dan agresif dalam kebijakan dan program pengembangan agribisnis ayam ras, tidak hanya terbatas pada restrukturisasi perunggasan tetapi juga pengembangan usaha dan lapangan pekerjaan serta berusaha di perunggasan. Kebijakan dan program utama yang sangat diperlukan untuk membantu dan menopang usaha budidaya ayam ras pedaging sektor-3 dan sektor-4 ini adalah program penjaminan kredit sarana produksi melalui perusahaan inti seperti yang dilaksanakan di kelapa sawit dan gula, subsidi bunga kredit peternakan, asuransi kredit dan usaha budidaya perunggasan, bantuan langsung dan bantuan sosial untuk perunggasan seperti telah banyak diberikan di tanaman pangan padi, jagung, dan kedele, dan bantuan vaksinasi bermutu serta dukungan inovasi teknologi peningkatan biosekuriti, seperti terlihat pada karakteristik profil industry perunggasan pada Tabel 2.

Dari total 4.319 perusahaan yang tercatat oleh BPS di perunggasan nasional pada tahun 2006, sebanyak 4.203 atau 97 % adalah perusahaan di usaha budidaya ayam ras pedaging dan petelur. Sisanya adalah perusahaan di perbibitan ayam ras, budidaya dan perbibitan ayam buras, dan budidaya dan perbibitan itik. Dan dari seluruh perusahaan yang tercatat tersebut, sebanyak 3.289 perusahaan atau sebesar 76,2 % adalah sebagai usaha perorangan dan 842 perusahaan lainnya atau 19,5 % adalah usaha lainnya. Hanya 4,3 % atau sebanyak 178 perusahaan yang berbadan hukum resmi baik itu PT/CV/Firma atau koperasi. Artinya, fluktuasi harga terutama di hasil panen baik itu ayam ras pedaging hidup atau telur ayam ras sebenarnya langsung dan lebih banyak merugikan bagi peternak rakyat skala kecil dan rumah tangga serta *backyard* dan jumlah mereka ini sangat dominan.

Barometer populasi ayam ras pedaging nasional adalah wilayah Jabodetabek (termasuk Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta). Hampir 1/4 (seperempat) populasi ayam ras pedaging nasional dihasilkan di wilayah ini, yaitu sekitar 23.28 persen atau sekitar 351,04 juta ekor per tahun (Tabel 3 dan Grafik 1). Populasi ini berarti sekitar 1 (satu) juta ekor ayam ras pedaging dibudidayakan di wilayah ini. Di wilayah

Jabodetabek ini, Propinsi Jawa Barat mendominasi secara absolut kontribusi populasi ayam ras pedaging di level nasional, dengan mencakup sekitar 21.55 persen dari populasi total nasional. Populasi ini rata-rata berkisar 325 juta ekor per tahun. Bahkan propinsi dengan kontribusi populasi kedua terbesar, yaitu Jawa Timur, hanya menyumbang sekitar 9.12 persen populasi nasional, atau mencapai 3/7 (tiga per tujuh) dari kontribusi Jawa Barat atau hanya dengan populasi rata-rata sekitar 138 juta ekor per tahun. Perbedaan nominal dan kontribusinya relatif berbeda jauh sekali.

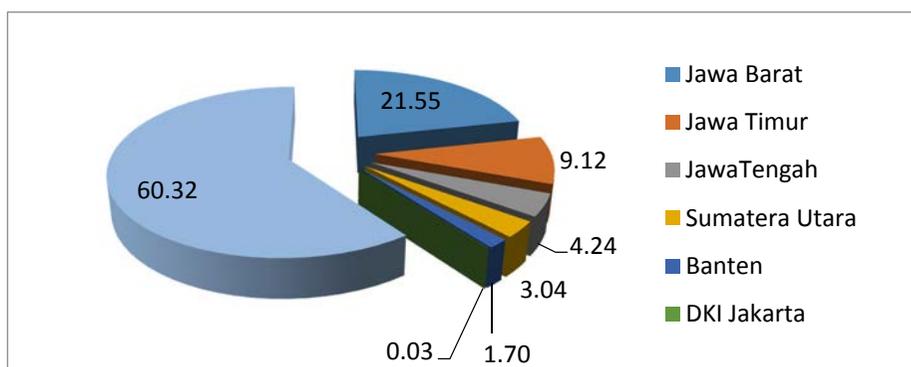
Tabel 2. Profil Industri dan Produk Perunggasan Indonesia Berdasarkan Kategori Nilai Total Industri (*Turn Over*) Tahun 2007-2009

Karakteristik	Sistem Produksi			
	Industri Terintegrasi	Komersial		Usaha Sambilan
		Biosekuriti		
		Tinggi	Rendah	
Sektor 1	Sektor 2	Sektor 3	Sektor 4	
Biosekuriti	Tinggi	Sedang -tinggi	Rendah	Rendah
Penjualan produk	Ekspor/Kota	Kota/Desa	Desa	Desa/Kota
Ketertgantungan pada pasar input	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
Ketertgantungan pada transportasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
Lokasi	Dekat Kota Besar	Dekat Kota Besar	Kota Kecil dan Area pedesaan	Dimana saja, umumnya di daerah terpencil
Pemeliharaan unggas	Dalam ruangan	Dalam ruangan	Sebagian dalam/luar ruangan	Umumnya di luar ruangan
Kandang	Tertutup	Tertutup	Tertutup/Terbuka	Terbuka
Kontak dengan unggas lain	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontak dengan itik	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kontak dengan unggas liar	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Kotak dengan binatang liar	Tidak	Tidak	Ya	ya
Layanan kesehatan ternak	Mandiri	Membayar	Membayar	pemerintah
Sumber obat dan vaksin	Pasar	Pasar	Pasar/mitra	Pemerintah dan pasar
Sumber informasi teknologi	Perusahaan dan asosiasi	Pedagang input	Pedagang input	Petugas pemerintah
Ketahanan pangan pengusaha	Tinggi	Baik	Baik	Baik/Buruk
Jenis unggas	Komersial	Komersial	Komersial	Lokal

Tabel 3. Struktur Populasi Ayam Pedaging Ras Rata-rata Tahun 2000-2009 dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 Berdasarkan Propinsi Utama (%)

Propinsi	Populasi	Penduduk
Jawa Barat	21.55	18.12
Banten	1.70	4.47
DKI Jakarta	0.03	4.04
Wilayah Jabodetabek	23.28	26.63
Jawa Timur	9.12	15.77
JawaTengah	4.24	13.63
Sumatera Utara	3.04	5.46
27 Propinsi Lainnya	60.32	38.51

Sumber : Ditjennak, BPS, berbagai edisi (diolah)



Grafik 1. Persentase Populasi Ayam Ras Pedaging Berdasarkan Propinsi Utama (%)

Sumber: Ditjennak, 2010 (diolah)

Untuk Jawa Barat sendiri, sentra budidaya dan produksi utama ayam ras pedaging adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2006 dan 2010, kedua kabupaten ini menyumbang masing-masing sebesar 44,94 persen dan 35,71 persen total populasi ayam ras pedaging di Jawa Barat. Kabupaten Bogor sendiri menyumbang populasi ayam ras pedaging di Jawa Barat masing-masing 20,70 persen dan 19,01 persen (rata-rata hampir 1/5) pada tahun 2006 dan 2010. Kabupaten Bogor adalah penyuplai utama ayam ras pedaging untuk DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. Sedangkan Kabupaten Ciamis, yang merupakan penyuplai utama untuk Kotamadya Bandung dan daerah sekitarnya, menyumbang masing-masing pada tahun 2006 dan 2010 sebesar 24,24 persen dan 16,70 persen (atau rata-rata 1/5). Kedua kabupaten ini merupakan barometer (*benchmark*) untuk dinamika ayam ras pedaging nasional. Disamping beberapa kabupaten lainnya di sekitar DKI Jakarta dan Kotamadya

Bandung seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung.

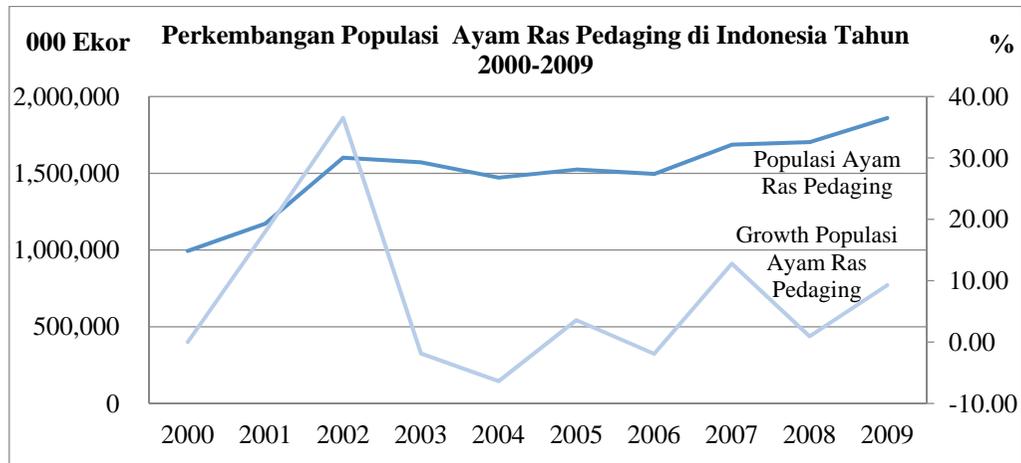
Dominasi dan kontribusi yang sangat sentral ini menjelaskan kenapa seringkali gejala, konflik, dan permasalahan dalam agribisnis perunggasan muncul dan terkonsentrasi di wilayah ini. Gejala baik kenaikan maupun anjloknya harga baik produk unggas maupun bahan baku seringkali terpicu di wilayah ini. Para peternak akan berteriak dan bergejolak di media massa baik nasional, regional maupun daerah bila terjadi kenaikan harga bibit DOC dan atau bila terjadi anjloknya harga ayam ras pedaging hidup. Sehingga wilayah ini khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi barometer dinamika agribisnis perunggasan ayam ras pedaging nasional. Untuk itu wilayah ini perlu menjadi perhatian khusus dan fokus dalam upaya stabilisasi baik harga maupun produksi.

Selanjutnya, dinamika populasi dan tingkat pertumbuhan populasi ayam ras pedaging di Indonesia dalam 10 (sepuluh) terakhir ini digambarkan dalam Grafik 2 berikut ini. Secara umum dan tren selama 10 tahun populasi ayam ras pedaging di Indonesia meningkat. Secara rata-rata, tingkat pertumbuhan populasi ayam ras pedaging dari tahun 2000-2009 cukup tinggi, yaitu sekitar 7,9 persen (Tabel 3). Pertumbuhan populasi ayam ras pedaging yang tinggi tersebut diperkirakan disumbangkan oleh faktor-faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai rata-rata 1,25 persen setiap tahun, dan pertumbuhan pendapatan penduduk yang didekati dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 6 persen setiap tahun, serta pertumbuhan faktor permintaan daging ayam ras lainnya. Artinya pertumbuhan populasi ayam ras pedaging mampu mengimbangi bahkan melebihi peningkatan permintaan agregat nasional, dan hal ini merupakan prestasi menggembirakan dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk masa mendatang.

Hanya saja populasi dan tingkat pertumbuhannya menunjukkan pola naik-turun secara bergantian antar satu tahun dengan tahun berikutnya dan berhubungan dengan guncangan-guncangan (*shocks*) yang terjadi. Sebelum merebaknya kasus flu burung tahun 2003, pola ini berlangsung per 2 (dua) tahunan dan berubah setelah merebaknya kasus flu burung pola ini berubah menjadi lebih cepat yaitu menjadi per tahun.

Pada Grafik 2 Populasi ayam ras pedaging meningkat terus dari tahun 2000 sampai tahun 2002, berturut-turut dari 993.611.000 ekor ke 1.172.730 ekor dan 1.601.312 ekor. Lalu menurun dalam dua tahun berikutnya yaitu 2003-2004 menjadi 1.571.726 ekor dan 1.471.772 ekor. Tahun-tahun ini adalah masa berlangsungnya wabah flu burung dan tahap pemulihan kembali dari kasus flu burung. Setelah 2004, populasi ayam ras pedaging menunjukkan pertumbuhan yang positif kembali dengan tingkat pertumbuhan yang positif juga. Tahun 2005 populasi ayam ras pedaging meningkat dari tahun 2004 menjadi 1.524.385 ekor. Lalu turun lagi pada tahun 2006.

Populasi ayam ras pedaging naik kembali pada tahun 2007 dan sudah melampaui tingkat populasi nasional sebelum kejadian wabah flu burung.



Keterangan : Populasi (sumbu kiri garis Biru) dan growth (sumbu kanan garis warna biru muda)

Grafik 2. Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging di Indonesia Tahun 2000-2009

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan, dari berbagai edisi diolah

Selama periode 10 tahun terakhir terjadi dua guncangan (shock) pada industri ayam ras nasional, yaitu merebaknya wabah flu burung antara 2003-2005 dan naiknya harga pakan akibat krisis pangan dan bahan bakar fosil di akhir tahun 2007. Kedua guncangan (shock) tersebut sempat mempengaruhi kinerja industri ayam ras termasuk ayam pedaging di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada dinamika populasi dari waktu-ke waktu pada Tabel 3 dan Grafik 2. Secara agregat nasional, populasi ayam pedaging mengalami penurunan pada saat wabah flu burung tahun 2003 – 2005. Penurunan tersebut dapat disebabkan kematian ternak karena terserang virus HPAI atau turunnya produksi akibat turunnya permintaan karena konsumen takut terinfeksi virus HPAI jika mengkonsumsi daging ayam (Yusdja, *et al.* 2010). Dengan berbagai upaya pengendalian wabah dan sosialisasi ke konsumen akhirnya industri unggas nasional bangkit kembali. Gejolak harga pakan akhir tahun 2007 yang sempat mengguncang beberapa daerah sentra produksi tidak berdampak industri ayam pedaging nasional. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan kinerja agribisnis ayam ras pedaging relatif tangguh dan kuat serta telah dapat diandalkan.

Pengaruh wabah flu burung sekitar 2003-2006 bervariasi pada tiap wilayah. Di Sumatera, wabah flu burung dan kenaikan harga pakan menurunkan populasi ayam ras pedaging. Pengaruh di wilayah ini lebih disebabkan adanya kedua pengaruh tersebut di Sumatera Utara. Sementara Di Lampung wabah flu burung tidak

mempengaruhi, tetapi kenaikan harga pakan mempengaruhi populasi ayam ras pedaging.

Di wilayah Jawa kedua pengaruh tersebut tidak berdampak pada penurunan populasi ayam ras pedaging. Bahkan di Jawa Barat sebagai sentra produksi utama justru populasi ayam ras pedaging semakin meningkat. Di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua wabah flu burung dan kenaikan harga pakan juga tidak nyata mempengaruhi populasi. Hanya di daerah Bali dan Nusa Tenggara yang menunjukkan bahwa wabah flu burung dan kenaikan harga pakan berpengaruh terhadap penurunan populasi ayam ras pedaging.

Pengaruh yang berbeda-beda tersebut dapat disebabkan beberapa hal yang berbeda-beda. Beberapa sebab yang dapat mempengaruhi populasi adalah: (1) sosialisasi terhadap konsumen bagaimana menangani produk unggas untuk menghindari flu burung dapat meningkatkan permintaan daging ayam sehingga memicu kembali usaha budidaya dan meningkatkan populasi; (2) penggunaan jagung yang kompetitif untuk industri non pakan dan ekspor atau terbatasnya produksi jagung lokal mendorong naiknya harga jagung dan pakan sehingga mempengaruhi usaha budidaya dan populasi ayam ras pedaging, seperti kasus Lampung, NTB dan NTT; (3) pola usaha mandiri dengan modal terbatas banyak yang *collaps* akibat wabah flu burung dan naiknya harga pakan, namun segera pulih karena pada daerah itu berkembang pesat usaha budidaya pola kemitraan seperti kasus di Jawa Barat dan Lampung; (4) kepadatan unggas yang tidak terlalu tinggi sehingga pengendalian penyakit flu burung mudah dilakukan, seperti kasus di NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; (5) pembatasan usaha budidaya untuk menghindari kasus flu burung pada manusia pada daerah-daerah sangat strategis seperti kasus Jakarta dan Bali.

3.5. Permasalahan Budidaya Ayam Ras Petelur

Penyebaran populasi ayam ras petelur yang lebih luas dan lebih merata ini berhubungan dengan kemudahan dalam menyediakan pakan dan distribusi hasil, pakan ayam petelur lebih mudah diperoleh karena komponennya terdiri dari: konsentrat yang merupakan campuran komponen utama ditambah dengan dedak dan tepung jagung dengan komposisi disesuaikan sendiri oleh peternak sesuai harga pakan dan harga telur. Jika dibandingkan pakan broiler yang 100 persen merupakan formula pabrik pakan, peternak ayam ras pedaging hanya tinggal menggunakan. Demikian juga produknya berupa telur dapat ditangani dan didistribusi tanpa membutuhkan fasilitas pendingin telur mampu bertahan sekitar 15 hari setelah diproduksi.

Usaha ini lebih banyak dilakukan dengan pola usaha mandiri. Menurut Statistik Peternakan (Ditjen Peternakan, 1988, 1992, dan 2001), sejak tahun 1986 semua propinsi di Indonesia (27 propinsi) sudah tercatat ada usaha budidaya ayam ras

petelur. Bandingkan dengan penyebaran populasi ayam ras pedaging pada tahun 1986 baru terdapat pada 19 propinsi. Historis ini mengindikasikan bahwa ayam ras petelur lebih dekat kepada usaha rakyat dan menyebar ke berbagai propinsi.

Tabel 4. Struktur Populasi Ayam Ras Petelur Rata-rata Tahun 2000-2009 dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 Berdasarkan Propinsi Utama (%)

Propinsi	Populasi	Penduduk
Jawa Timur	25.69	15.77
Jawa Tengah	12.62	13.63
Jawa Barat	10.98	18.12
Banten	6.27	4.47
Sumatera Utara	12.19	5.46
27 Propinsi Lainnya	32.25	42.55

Sumber : Ditjennak, BPS, berbagai edisi (diolah)

Bila dipilah dan ditinjau lebih detail lagi, maka daerah kabupaten konsentrasi dan barometer ayam ras petelur di Jawa Timur adalah Kabupaten Blitar. Lebih dari 44.05 persen atau lebih dari 9,43 juta ekor populasi ayam ras petelur di Jawa Timur dibudidayakan di kabupaten ini saja. Konsentrasi dan dominasi kabupaten ini dalam hal populasi dan produksi telur ayam ras sangat tinggi dan dominan sekali. Kabupaten ini merupakan barometer dinamika dan kondisi agribisnis ayam ras petelur tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga secara nasional.

Sementara untuk Jawa Tengah, sentra budidaya ayam ras petelur terkonsentrasi dan didominasi oleh daerah (kabupaten/kota) di sekitar kota Semarang, yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Kelima daerah ini meliputi lebih dari 42.19 persen dari total populasi ayam ras petelur di Jawa Tengah pada tahun 2010, atau sekitar 7,47 juta ekor dari total 17,72 juta ekor (Disnakeswan Jawa Tengah, 2010). Dismasing itu, budidaya ayam ras petelur baik milik peternak maupun perusahaan menengah dan besar jug berlokasi di daerah sekitar ini. Konsentrasi dan dominasi populasi ini cukup tinggi dan besar. Kondisi ini juga yang menyebabkan berbagi dinamik, gejolak, dan konflik yang terkait dengan budidaya ayam ras petelur seringkali muncul pertama kali dan bermula dari daerah sekitar ini. Untuk itu, dalam hal perencanaan, implementasi dan pengembangan baik strategi, kebijakan maupun kegiatan pembangunan agribisnis ayam ras petelur termasuk upaya stabilisasi harga harus mempertimbangkan dan meliputi sentra produksi Semarang dan sekitarnya ini.

Propinsi lain di pulau Jawa yang juga relatif besar kontribusinya adalah Jawa Barat, terutama sejak flu burung tahun 2005. Bila pada masa sebelum tahun 2005 populasi ayam ras petelur lebih banyak di Sumatera Utara, tapi setelahnya, populasi di Propinsi Jawa Barat justru lebih besar dari populasi Propinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 10.612.600 ekor pada tahun 2009 dibandingkan dengan 7.702.000 ekor di

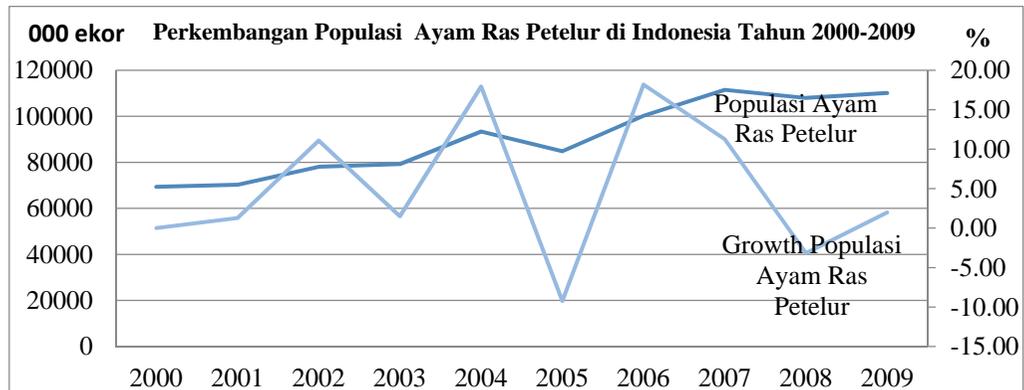
Sumatera Utara. Populasi ayam ras petelur di Sumatera Utara merosot cukup besar, terutama sejak tahun 2005, akibat dampak flu burung; kebalikannya dengan sentra produksi ayam ras petelur utama lainnya yang justru terus meningkat. Hanya Propinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat sentra populasi ayam ras petelur utama yang mengalami pertumbuhan populasi yang negatif dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini dibandingkan dengan sentra budidaya ayam ras petelur utama lainnya.

Kenaikan dan pertumbuhan faktor permintaan telur ini juga yang mendorong pertumbuhan populasi di sentra budidaya utama. Pertumbuhan populasi di sentra budidaya utama yang tertinggi dialami oleh Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,84 % per tahun, lalu diikuti oleh Propinsi Jawa Tengah (11,09). Sementara sentra budidaya lainnya bertumbuh secara moderat, seperti Bali (10,13 %), Sumatera Selatan (9,91), Sulawesi Selatan (8,11), dan Sumatera Barat (7,7 %). Sementara propinsi lain yang baru menjadi pusat pertumbuhan budidaya bertumbuh hanya sekitar 25-35 % per tahun, seperti di Papua Barat, Maluku Utara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur.

Perkembangan populasi ayam ras petelur di Indonesia dari tahun 2000-2009 digambarkan dalam Grafik 3 berikut ini. Grafik ini menggambarkan populasi nominal dan tingkat pertumbuhan populasi ayam ras petelur secara nasional. Secara agregat nasional, dampak wabah flu burung dan kenaikan harga pakan yang terjadi selama periode 2000-2009 terhadap dinamika populasi ayam petelur tidak terlalu nyata dan berbeda dinamikanya bila dibandingkan dengan ayam ras petelur. Baru pada tahun 2004 terjadi penurunan populasi dari 93 juta ekor menjadi 85 juta ekor tahun 2005, padahal wabah HPAI telah berlangsung tahun 2003. Namun kemudian populasi dapat naik kembali menjadi 100 juta tahun 2006. Demikian juga saat krisis harga pangan akhir 2007, populasi ayam ras petelur turun dari 111 juta ekor 2007 menjadi 108 juta ekor 2008 dan pulih kembali menjadi 110 juta ekor pada tahun 2009.

Fenomena yang diutarakan mengindikasikan bahwa industri ayam ras baik petelur maupun pedaging sensitif terhadap perubahan ekonomi dan faktor teknis lain seperti harga dan penyakit, namun kemampuannya untuk pulih juga sangat cepat. Sensitifitas sekaligus ketangguhan serta keunggulan ini berhubungan dengan struktur, perilaku dan kinerja keseluruhan sistem agribisnis beserta dengan seluruh subsistem yang terintegrasi didalamnya yang relatif saling menopang dan saling menarik satu sama lain. Hanya saja tetap diperlukan upaya dan usaha untuk segera menemukan vaksin, obat, dan manajemen penanganan penyakit terutama flu burung. Untuk pemerintah perlu bekerja lebih keras dan efektif dalam hal manajemen vaksin dan obat ini. Selain itu, pemerintah perlu secara aktif, berpihak, dan elegan menjaga stabilisasi dan keseimbangan harga baik produk unggas maupun sarana produksi seperti bibit/DOC dan bahan baku seperti jagung dan konsentrat untuk menciptakan daya tarik dan jaminan keuntungan bagi para peternak dan juga bagi para pelaku usaha peternakan lainnya. Dan pemerintah juga perlu mendukung pengembangan dan

penyempurnaan mekanisme, model, dan sistem kemitraan yang selama ini menjadi andalan budidaya terutama di ayam ras pedaging.



Grafik 3. Perkembangan Populasi Ayam Ras Petelur di Indonesia Tahun 2000-2009

Sumber : Ditjennak, berbagai edisi (diolah)

Namun demikian ada dinamika perusahaan yang unik di perunggasan, khususnya pada bidang budidaya. Usaha ayam ras merupakan usaha pada teknologi dan modal, karena itu dibutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan teknis budidaya dan manajemen usaha serta kemampuan finansial atau modal yang kuat juga. Tuntutan demikian dengan berbagai gejala yang ada memarjinalkan peternak skala kecil. Kecenderungan yang terjadi pada usaha budidaya ayam pedaging adalah makin berkembangnya usaha pola kemitraan antara peternak dengan pengusaha. Sementara itu gejala, konflik, dan rongrongan terhadap model dan mekanisme kemitraan pada perunggasan belakangan ini semakin kuat dan kurang produktif serta malah meningkatkan ketidakpastian usaha. Kondisi ini pada jangka pendek maupun jangka menengah dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pertumbuhan populasi dan produksi terutama ayam ras pedaging.

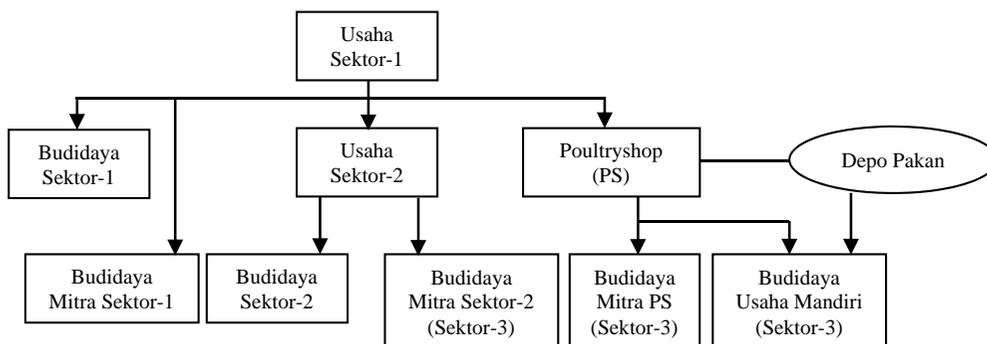
Pada usaha budidaya ayam petelur, dibutuhkan modal lebih besar, sehingga mendorong kecenderungan usaha skala kecil menjadi bangkrut dan akhirnya yang bertahan merupakan usaha skala menengah dan besar. Tentu dinamika dan fenomena ini kurang baik dan perlu diatasi serta difasilitasi oleh pemerintah. Walau secara lebih detail dan mendalam, fenomena dan kondisi ini masih perlu ditelusuri dan dikaji lagi. Masih terbatas informasi, data, dan hasil kajian yang terkait langsung dengan fenomena ini baik secara nasional maupun regional/daerah.

Jika kecenderungan yang demikian terus terjadi tanpa ada kepedulian untuk mengatasi dan berpihak kepada peternak rakyat, maka industri ayam ras yang mampu tumbuh dengan cepat akan tumbuh sendiri dan kurang banyak mendorong dan menghela sektor usaha skala rakyat dan kecil dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan pendapatan peternak khususnya dan petani serta masyarakat umumnya. Padahal dari sejak awalnya pertumbuhan dan kemajuan agribisnis perunggasan nasional sebagian besar ditopang dan disumbangkan oleh para peternak rakyat dalam program kemitraan. Kondisi yang surut ini perlu mendapat perhatian dan keberpihakan langsung baik secara teknis maupun kebijakan serta politis dari pemerintah.

3.6. Sistem Pemasaran Sarana Produksi (DOC dan Pakan)

Pemasaran sarana produksi ayam ras seperti DOC dan pakan dapat ditelusuri menurut struktur industri perunggasan. Perusahaan sektor satu yang merupakan usaha yang terintegrasi sejak saprodi hingga pengolahan hasil memproduksi DOC dan Pakan. Hasil produksi input tersebut sebagian digunakan pada usaha budidaya yang dilakukan langsung oleh sektor 1, sebagian dijual ke plasma sektor 3 sebagai mitra usaha, sebagian dijual ke sektor 2 sebagai usaha budidaya skala besar mandiri, dan sebagian dijual ke pasar melalui poultryshop.

Usaha sektor dua menggunakan input yang dibelinya dari sektor 1 untuk usaha budidaya yang dilakukan sendiri dan didistribusikan ke plasma sebagai partner usaha sektor 2. Demikian juga dengan poultryshop, saprodi yang dibeli sebagian dijual ke peternak bebas/mandiri yang termasuk sektor 3 dan sebagian didistribusikan ke mitra usaha yang merupakan peternak sektor 3. Alur distribusi sarana produksi baik DOC maupun pakan dapat diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Rantai Pasok Sarana Produksi Usaha Budidaya Ayam Ras di Indonesia

Gambar 1 menunjukkan bahwa pola pemasaran sarana produksi ayam ras sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan jalur masing-masing. Ada tiga tingkatan pelaku yang terlibat yaitu usaha integrasi sektor-1 termasuk usaha budidayanya pada tingkat pertama; usaha budidaya mitra sektor-1, usaha sektor-2 termasuk usaha budidayanya serta usaha PS pada tingkat kedua; dan usaha budidaya mitra sektor-2, budidaya mitra PS dan Budidaya mandiri pada tingkat ketiga.

Peran sektor-1 sebagai produsen DOC dan pakan sangat strategis karena produk yang dihasilkan dapat digunakan sendiri, dijual ke sektor-2 dan/atau dijual ke PS. Dengan demikian sektor-1 dapat memperkirakan pangsa masing-masing sehingga dapat mengendalikan harga sarana produksi. Sebagai perusahaan dengan fasilitas yang lebih lengkap sektor-1 dapat melakukan penyimpanan atau pengilangan hasil. Peran tersebut juga memungkinkan sektor-1 mengendalikan harga produk, utamanya produk budidaya ayam pedaging. Dari sisi budidaya, usaha sektor 1 merupakan usaha yang berpotensi mendapat keuntungan paling besar.

Peran sektor-2 selain sebagai usaha budidaya juga mitra usaha sektor-3. Sebagai usaha budidaya sektor-2 berada di bawah sektor-1 satu tingkat dan sama dengan usaha budidaya mitra sektor-1. Keuntungan usaha sektor-2 diperoleh dari hasil budidaya dan margin yang diterima dari mitranya usaha sektor-3. Keberlanjutan usaha sektor-2 ini sangat tergantung pada seberapa besar usaha sektor-1 melakukan usaha budidaya. Secara teoritis usaha budidaya sektor-1 akan lebih efisien dan mampu menjual dengan harga murah atau menjual dengan harga sama dengan sektor-2 tetapi memperoleh untung lebih besar. Oleh karena itu, dalam menjalankan usaha budidaya, sektor-2 selain berhadapan sesama sektor-2 juga berhadapan dengan sektor-1. Segmentasi pasar berdasarkan geografis merupakan solusi untuk mengembangkan usaha lebih besar.

Peran PS sebagai usaha dagang yang tidak melakukan usaha budidaya keberlanjutannya tergantung pada banyaknya pelanggan. Untuk itu PS berusaha menjalin kemitraan dengan sektor-3. Agar terjaring banyak usaha kemitraan strategi yang dilakukan adalah memperkecil margin dan memperbanyak mitra sehingga omset usaha tetap ekonomis dan mampu bersaing dengan sektor-2, melakukan segmentasi pasar berdasarkan geografis, memberikan pembinaan teknis pada sektor-3 agar peternak mitra dan mandiri banyak bergabung dengan PS.

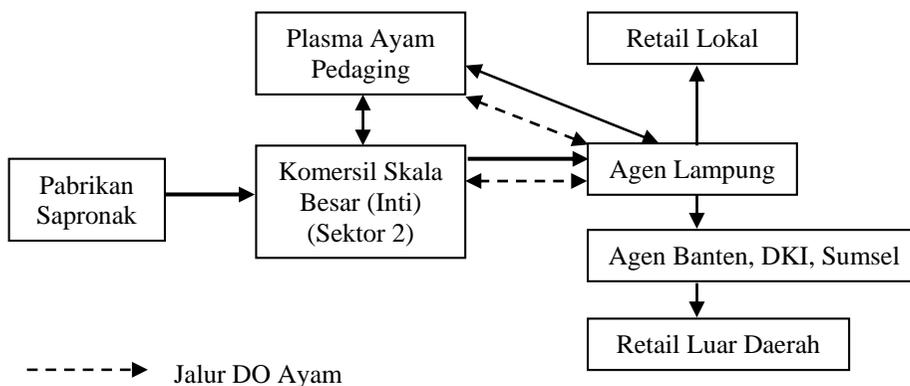
Sektor-3 merupakan usaha paling kritis karena hanya bertindak sebagai price taker sejati. Usaha ini menghadapi strategi pasar yang dilakukan sektor-1 dan sektor-2. Oleh karena itu untuk menghindari risiko, banyak usaha sektor-3 yang bergabung dalam usaha kemitraan. Usaha sektor 3 mandiri, khususnya pada usaha ayam pedaging sangat jarang dijumpai. Walaupun ada pasarnya sudah tertentu dan lokasi usahanya sangat terbatas.

3.7. Pemasaran Hasil Produksi (Ayam Pedaging dan Telur)

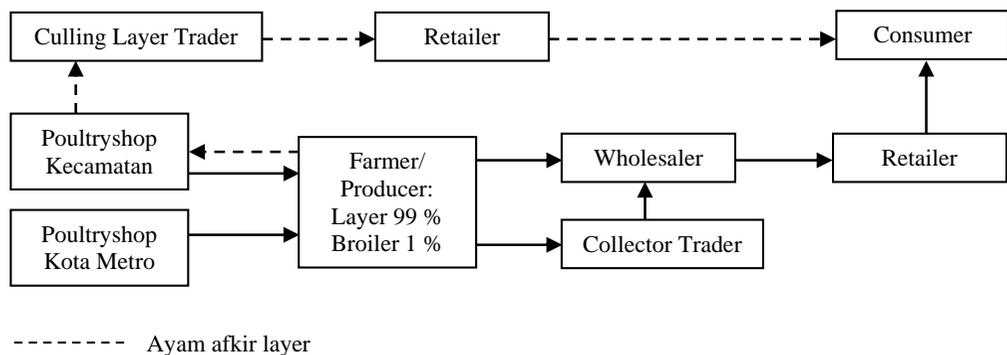
Gambar 2 menunjukkan pola pemasaran ayam pedaging pola kemitraan sektor-2 di Metro Lampung. Usaha kemitraan bertindak sebagai inti dan menyediakan bibit, pakan, dan obat-obatan untuk peternak plasma. Kemudian peternak plasma menjual hasil ayam hidup ke inti. Disamping itu pihak inti juga melakukan usaha budidaya sehingga skala usaha semakin besar.

Dengan adanya HP sebagai alat komunikasi perdagangan ayam pedaging menjadi lebih lancar. Pemasaran ayam dapat langsung dilakukan oleh sektor-2 atau agen-agen yang banyak berkembang di daerah-daerah sentra produksi. Agen-agen tersebut membeli DO pada perusahaan inti untuk mengambil ayam pedaging pada peternak plasma. Kemudian plasma melaporkan pada inti dan pembayaran untuk peternak dilakukan dengan tranfer bank. Gambar 3 berikut merupakan varian pola pemasaran kasus di Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Untuk menghindari penyebaran penyakit dan menurunkan angka kematian ayam selama transportasi, perlu terus diupayakan sosialisasi perdagangan antar daerah dalam bentuk karkas, fiilet, sosis dan nugget. Saat ini memang banyak konsumen lebih menyukai membeli ayam hidup dibandingkan karkas ayam. Hal itu beralasan karena keraguan mereka terkait produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), utamanya terkait cara pemotongan yang menurut Syariat Islam dan adanya kasus ayam “tiren” (mati kemarin-ayam mati). Jika ada regulasi yang jelas, penjualan karkas ayam yang dipotong RPA diawasi dokter hewan dan MUI diyakini konsumen akan menjadi lebih tertarik membeli karkas.



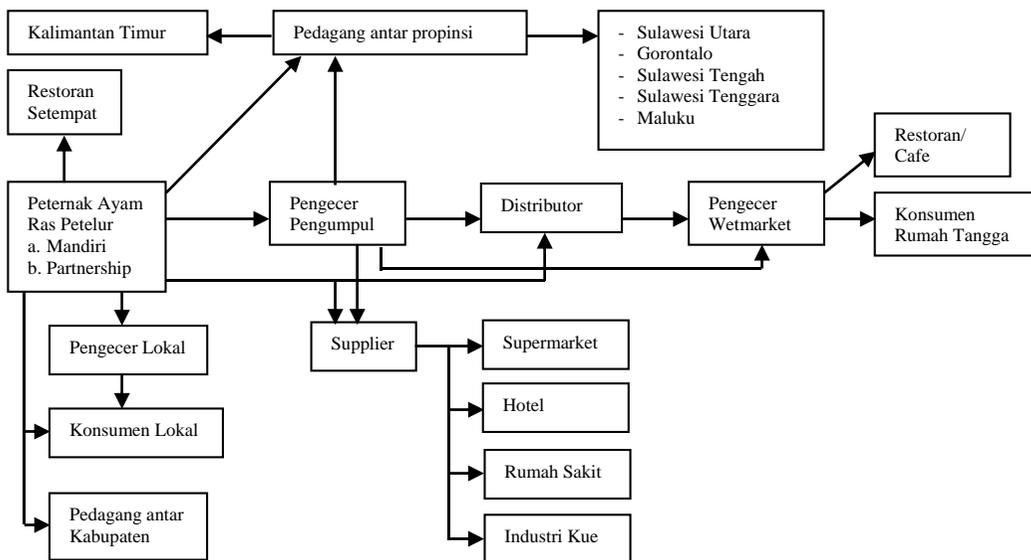
Gambar 2. Pola Pemasaran Ayam Pedaging pada Pola Kemitraan di Metro Lampung, Tahun 2007



Gambar 3. Pola Pemasaran Output Ayam Ras di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Tahun 2005-2007

Gambar 4 mengilustrasikan pola pemasaran telur hasil usaha budidaya ayam petelur di daerah sentra produksi Sulawesi Selatan (Hadi, *et al.* 2007). Di daerah itu usaha ayam ras petelur ada yang usahakan dengan pola mandiri dan ada juga yang diusahakan dengan pola kemitraan. Pada usaha mandiri, peternak bebas memasarkan telur yang dihasilkan, sedangkan pada pola kemitraan peternak sebagai plasma memasarkan hasil produksi telur melalui perusahaan inti yang juga merupakan peternak ayam petelur skala besar. Peternak skala besar dapat langsung memasarkan hasil ke pedagang antar propinsi dan distributor di Kota Makassar, sedangkan petani skala kecil tidak tetapi melalui pedagang perantara yang ada.

Bentuk produknya yang tahan sekitar 15 hari pada suhu kamar, harganya yang relatif murah, nilai nutrisinya tinggi, dan dibutuhkan banyak lapisan konsumen (industri, rumah sakit, restoran, hotel, dan rumah tangga) maka secara spasial jaringan pemasaran telur menyebar sangat luas ke berbagai daerah. Kondisi yang demikian secara fungsional pemasaran telur juga melibatkan berbagai tingkat pedagang. Mengingat pada daerah tujuan pasar juga ada usaha budidaya ayam ras petelur, maka, secara spasial harga antar daerah dipengaruhi oleh pasokan telur dari sentra produksi utama. Untuk kasus kawasan Indonesia Timur adalah daerah Sulawesi Selatan (Sidrap) dan Jawa Timur (Blitar) (Hadi *et al.* 2007). Harga telur ditentukan juga oleh sarana transportasi yang digunakan. Jika ada gangguan transportasi (laut) maka pasokan telur tegang dan harga menjadi naik.



Gambar 4. Rantai Pemasaran Telur Ayam Ras di Daerah Sentra Produksi Sulawesi Selatan, 2007

Pemasaran sapirodi ayam ras dikendalikan oleh sektor-1. Jika pasar kurang menyerap (sektor-2 dan PS) sapirodi dapat digunakan untuk usaha budidaya sektor-1 dan mitra usaha sektor-1. Demikian juga dengan pasar output, utamanya ayam broiler, sektor satu mengendalikan pasar produk yang dihasilkan usaha budidaya sektor-1 dan mitra sektor-1 yang dipasarkan oleh sektor-1. Disamping itu, dengan usaha yang terintegrasi maka secara konsepsi keuntungan usaha sektor-1 dan mitra sektor-1 lebih tinggi dari keuntungan usaha sektor-2, sektor-3 dengan berbagai varian. Dari dua keuntungan tersebut pihak sektor-1 dapat mengendalikan harga input dan output.

Berdasarkan hal itu, maka fluktuasi harga selain disebabkan faktor eksternal seperti adanya fluktuasi bahan baku pangan di pasar internasional dapat juga disebabkan faktor internal yang merupakan kebijakan usaha sektor-1. Oleh karena itu untuk menstabilkan harga akibat fluktuasi harga yang dapat merugikan peternak dan konsumen, jika ada fluktuasi harga perlu diidentifikasi faktor penyebabnya. Sebaiknya penyebab internal dapat dihindari. Selain itu, untuk asas keadilan perlu dikaji lebih lanjut seberapa besar keuntungan usaha budidaya ayam ras pedaging pada peternak sektor-3 mandiri, sektor-3 mitra PS, sektor-3 mitra sektor-2, sektor-3 mitra sektor-1, sektor-2 dan sektor-1. Jika ada ketimpangan perlu dilakukan harmonisasi pihak-pihak mana saja yang dapat melakukan usaha budidaya, pola usaha bagaimana yang layak dikembangkan. Apakah pada usaha ayam pedaging sudah tidak layak lagi usaha mandiri.

3.8. Kebijakan Pemerintah Atas Budidaya Ayam Ras Petelur dan Pedaging dan Sarana Produksi

Untuk melindungi usaha skala kecil akibat berkembangnya usaha budidaya skala besar, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan skala usaha maksimum 5.000 ekor per orang/lembaga dalam bentuk Kepres No 50/1980. Menurut Yusdja dan Pasandaran (1998) kebijakan ini tidak sejalan dengan harapan pabrik pakan dan usaha pembibitan yang telah menanam investasi besar untuk menyediakan usaha skala besar yang telah dibatasi pemerintah. Akibatnya dua jenis perusahaan tersebut terlibat melakukan usaha budidaya ayam ras skala besar untuk menyelamatkan investasi yang terlanjur ditanamkan.

Ketidakmampuan pemerintah melakukan pengawasan berkembangnya usaha skala besar dengan Kepres No 50/1980, akhirnya diambil jalan tengah dengan kebijakan berupa Kepres No 22/1990. Kebijakan ini memberi kesempatan pemodal untuk melakukan usaha budidaya ayam ras dimana hasil produksinya ditujukan untuk pasar ekspor. Selain itu, dalam menjalankan usahanya perusahaan besar harus melakukan kemitraan dengan peternak skala kecil. Sejak itu struktur produksi usaha ayam ras terdiri dari usaha skala besar, usaha skala kecil kemitraan dan usaha skala kecil mandiri. Walaupun usaha peternakan rakyat dan rumah tangga juga masih relatif besar perannya.

3.9. Rekomendasi Kebijakan

Beberapa kajian fluktuasi dan lonjakan harga komoditas pangan utama dilaksanakan untuk skala global dan regional seperti Bank Dunia, FAO, dan ADB. Umumnya lonjakan harga ini secara global disebabkan oleh faktor perubahan iklim global yang menyebabkan beberapa kegagalan dan penurunan produksi di negara-negara produsen utama, menurunnya tingkat produksi global akibat kombinasi faktor-faktor menurunnya produktifitas secara global, dan tekanan permintaan tambahan untuk kebutuhan dan pengembangan komoditas pangan untuk produksi bahan bakar nabati (biofuel). Tetapi kajian untuk level nasional masih terbatas sekali. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar pemerintah dapat memiliki informasi, pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam rangka menekan fluktuasi dan lonjakan harga-harga komoditas pangan utama, mengendalikan inflasi, dan membantu masyarakat miskin. Serta merencanakan dan mengimplementasikan program dan upaya antisipasi serta penanggulangan lonjakan harga tersebut.

Beberapa implikasi dan konsekuensi yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan, penyusunan dan implementasi suatu kebijakan atau program pembangunan agribisnis ayam ras nasional diuraikan pada bagian berikut ini.

Pertama. Dari seluruh sistem agribisnis ayam ras (mulai dari agribisnis hulu sampai agribisnis hilir; mulai dari subsistem sarana produksi (DOC, pakan, obat-

obatan, dan perlengkapan) sampai subsistem pemasaran; subsistem budidaya adalah usaha yang memiliki margin keuntungan yang paling kecil, resiko usaha yang paling tinggi, dan daya tawar (*bargaining position*) yang paling rendah. Walaupun memang subsistem ini yang paling sedikit membutuhkan modal dan investasi, teknologi dan inovasi, serta penguasaan iptek dan informasi sehingga juga merupakan usaha yang paling mampu dikuasai dan dilakukan oleh peternak-peternak rakyat yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan terbatas, modal dan investasi yang rendah, serta penguasaan iptek dan informasi yang sangat rendah.

Para peternak rakyat menjadi penerima harga (*price taker*) sekaligus untuk sarana produksi (DOC dan pakan) dan hasil panen (ayam ras pedaging hidup dan telur ayam ras). Dan sebagai penerima harga, para peternak rakyat ini juga langsung terkena dampak dan merupakan pelaku yang paling dirugikan dari dinamika fluktuasi harga baik sarana produksi dan hasil panen. Dan dinamika fluktuasi harga ini bersifat asimetris dan kurang adil, dalam pengertian bahwa harga sarana produksi walau terkadang turun, tetapi dalam keseimbangan setahun selalu cenderung naik, terutama pakan. Harga pakan selalu naik tiap tahun dan tidak pernah turun. Harga DOC memang terkadang bisa turun, tetapi dalam setahun harga DOC cenderung naik.

Kedua. Mungkin faktor-faktor dan kondisi ini yang membuat para pengusaha dan perusahaan besar kurang berminat untuk melakukan usaha budidaya secara serius dan besar-besaran. Perusahaan dan para pengusaha sektor 1 atau sektor 2 hanya mengusahakan kegiatan budidaya ini secara terbatas untuk menjamin pasar tertentu untuk produk lainnya yang dihasilkan secara terintegrasi seperti DOC dan pakan. Perusahaan lebih berkonsentrasi dan mengembangkan usaha di hulu seperti perbibitan dan pakan serta di hilir seperti rumah potong unggas, pemasaran dan distribusi daging dan produk olahannya, serta agroindustri produk makanan berbahan baku daging seperti sosis dan nugget.

Ketiga. Perusahaan di bidang perunggasan yang sebagian besar terintegrasi secara vertikal (baik penuh maupun menengah) dapat menikmati margin keuntungan yang lebih besar, lebih stabil, dan lebih berkesinambungan karena menguasai usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan usaha budidaya ayam ras seperti industri perbibitan dan industri pakan. Bahkan sebagian perusahaan juga terintegrasi sampai agroindustri makanan serta pemasaran dan distribusi (*trading*). Kondisi ini membuat perusahaan menjadi relatif lebih kuat dan tangguh baik dari sisi modal dan investasi, lebih mapan dari sisi penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta informasi, dan memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, yang selanjutnya dipergunakan untuk membangun keunggulan kompetitif total dalam agribisnis ayam ras.

Keempat. Untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha budidaya terutama bagi peternak rakyat, maka faktor utama dan aspek dominan yang perlu dikelola dan dicapai adalah adanya kestabilan dan jaminan harga yang relatif

menguntungkan. Pemerintah harus dapat memberikan iklim usaha yang kondusif melalui penciptaan dinamika harga hasil panen peternak rakyat yang relatif menguntungkan, relatif stabil (*less fluctuative*), dan dapat diprediksi. Usaha budidaya ayam ras memiliki resiko usaha yang relatif tinggi belakangan ini dengan ancaman bahaya penyakit, terutama H5NI (AI), dan resiko usaha karena kenaikan harga DOC dan pakan.

Di subsistem budidaya, para peternak terutama peternak rakyat dan kecil non kemitraan memerlukan dukungan pembiayaan dan atau subsidi dalam pengadaan input seperti DOC dan pakan juga dukungan pemasaran. Sementara untuk para peternak peserta kemitraan perlu didukung dalam hal jaminan kelangsungan dan daya tahan usaha dalam menghadapi goncangan atau kejadian diluar kebiasaan, yang seringkali membuat para peternak kemitraan ini bangkrut dan tidak mampu berusaha kembali, seperti program penjaminan kredit kemitraan atau program subsidi bunga kredit kemitraan. Dan juga dukungan layanan informasi, teknologi, dan inovasi unggulan di bidang budidaya ayam ras pedaging baik yang langsung hasil dari badan atau unit pemerintah maupun kolaborasi atau kerja sama dengan para pelaku usaha swasta baik besar maupun menengah.

Sementara bagi para pelaku usaha swasta besar dan menengah, dukungan dan jaminan keberlangsungan dan tingkat keuntungan usaha yang wajar atau normal menjadi salah satu insentif dan faktor pendorong yang perlu diciptakan dan difasilitasi pemerintah untuk tetap bisa mempertahankan pertumbuhan baik populasi maupun produksi produk-produk perunggasan (daging, telur, DOC, pakan, dan lain-lain). Termasuk juga dukungan dan jaminan dalam pengembangan model kemitraan perunggasan yang mampu menguntungkan seluruh pemangku kepentingan perunggasan dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah perlu secara aktif, berpihak, dan elegan menjaga stabilisasi dan keseimbangan harga baik produk unggas maupun sarana produksi seperti bibit/DOC dan bahan baku seperti jagung dan konsentrat untuk menciptakan daya tarik dan jaminan keuntungan bagi para peternak dan juga bagi para pelaku usaha peternakan lainnya. Dan pemerintah juga perlu mendukung pengembangan dan penyempurnaan mekanisme, model, dan sistem kemitraan yang selama ini menjadi andalan budidaya terutama di ayam ras pedaging. Model kemitraan di kelapa sawit dan gula dapat dijadikan model dan contoh dalam pengembangan kebijakan dan program pengembangan perunggasan nasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Secara internal, salah satu permasalahan dan tantangan utama adalah masih tingginya dan kurang terkendalinya fluktuasi harga daging dan telur di tingkat

peternak dan pasar tradisional serta harga bibit/DOC di tingkat peternak. Sementara harga sarana produksi seperti pakan, obat dan vaksin, dan lainnya umumnya relatif stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Padahal harga daging dan telur di tingkat pedagang besar, pasar modern, dan supermarket relatif stabil dan umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan, penyusunan dan implementasi suatu kebijakan atau program pembangunan agribisnis ayam ras nasional adalah perlunya menjaga stabilisasi dan keseimbangan harga baik produk unggas maupun sarana produksi seperti bibit/DOC dan bahan baku seperti jagung dan konsentrat untuk menciptakan daya tarik dan jaminan keuntungan bagi para peternak dan juga bagi para pelaku usaha peternakan lainnya.

4.2. Saran

Para pemangku kepentingan agribisnis perunggasan perlu berkoordinasi lebih intensif dan bekerja sama dalam kerangka *win-win solution* untuk mendapatkan alternatif kebijakan dan program bersama untuk mengurangi fluktuasi harga baik produk akhir maupun sarana produksi. Masih diperlukan kajian lain yang menganalisis faktor-faktor di luar harga produk dan sarana produksi yang memiliki keterkaitan kuat, signifikan dan langsung dengan fluktuasi harga tersebut. Salah satu faktor penting kemungkinan besar adalah sistem dan keterbukaan informasi tentang agribisnis perunggasan yang lebih komplit, terbuka, dan transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan perencanaan usaha-usahanya dengan lebih terkoordinasi serta mengurangi distorsi dan persaingan yang tidak perlu. Koordinasi dan program bersama dalam kerangka *win-win solution* ini perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selaras serta sejalan dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Perlunya pengembangan dan penyempurnaan mekanisme, model, dan sistem kemitraan yang selama ini menjadi andalan budidaya terutama di ayam ras pedaging. Model kemitraan di kelapa sawit dan gula dapat dijadikan model dan contoh dalam pengembangan kebijakan dan program pengembangan perunggasan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Adang dan Benny Rachman. Aspek Penyaluran Sapronek, Pemasaran Hasil dan Pola Kerjasama Dalam PIR Perunggasan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Forum Agro Ekonomi Volume 12 Tahun 1994.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia berbagai edisi. BPS. Jakarta (berbagai terbitan).

- Brazier, R. dan Sahala S. (Editor). Undang-Undang Antimonopoli Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usaha Kecil dan Menengah. The Asia Foundation. Jakarta (2003).
- Church, Jeffrey and Roger Ware. *Industrial Organization: A Strategic Approach*. McGraw Hill. Singapura (2000).
- Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian. *Statistik Peternakan berbagai edisi*. Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta (berbagai terbitan).
- Ilham, Nyak. Kelangkaan Produksi Daging: Indikasi dan Implikasi Kebijakannya. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 7 Nomor 1 Maret 2009: 43-63.
- Talib, Chatib, Ismeth Onounu dan Abdullah Bamualim. *Restrukturisasi Peternakan Di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 5 Nomor 1 Tahun 2007*. PSEKP. Bogor.
- Tambunan, Marcel Felix. *Kajian Pendekatan Hukum Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta (2006).
- Yusdja, Yusmichad dan Efendi Pasandaran. *Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan Di Indonesia*. Forum Agro Ekonomi Volume 16 Tahun 1998. PSEKP. Bogor.
- Kuncoro, Mudrajat, Adji A. dan Pradipto R. *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris*. Widya Sarana Informatika. Yogyakarta (1997).
- Motta, M. *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge University Press. Cambridge (2004).
- OECD. *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*. OECD. Paris (1996).

